

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inklusi keuangan perlu dikembangkan khususnya pada kalangan generasi milenial dan generasi muda lainnya sebab dengan mudahnya akses yang diberikan dapat membantu mereka dalam mengakses produk-produk keuangan. Banyak tersedianya Bank, mesin ATM dan mesin setor tunai di lingkungan sekitar khususnya Jakarta Selatan akan memudahkan generasi milenial untuk menabung. Selain itu, lembaga keuangan juga menyediakan layanan melalui Internet Banking, M-banking ataupun SMS banking yang semakin memudahkan akses generasi milenial. Semakin tinggi pemanfaatan fasilitas layanan jasa dan produk perbankan maka akan semakin tinggi pemanfaatan produk pada layanan jasa perbankan misalnya menabung (Sufyati Hs & Alvi Lestari, 2022)

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 / POJK.07 /2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inklusi Keuangan merupakan topik penting serta kerap digunakan sebagai perhatian kebijakan bagi pemerintah dan bank sentral di berbagai negara. Inklusi Keuangan merupakan sebuah *movement* dalam perluasan akses keuangan sehingga dapat dijangkau dan dinikmati oleh semua kalangan dan nantinya akan memperkuat pembangunan ekonomi yang berbasis keadilan dan kualitas serta untuk mengatasi kemiskinan. Negara dengan Inklusi Keuangan yang baik cenderung akan terbebas dari hambatan dalam mengakses layanan keuangan, termasuk dengan melibatkan infrastruktur dan teknologi di dalamnya (Santoso & Meera, 2017)

Pertumbuhan inklusif adalah tujuan yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi dunia, terutama di negara-negara Asia. Seluruh pemangku kebijakan sudah memberi perhatian terhadap inklusi keuangan, khususnya pada bidang ekonomi dan sosial dalam berbagai akses ke kesehatan, pendidikan, jamsos, sanitasi, listrik, dan transportasi, serta jasa finansial bagi seluruh lapisan penduduk.

Di Asia, program inklusi keuangan telah dilaksanakan dengan sangat intensif, menjangkau sebanyak mungkin orang yang belum menikmati layanan jasa keuangan formal karena terdapat hambatan akses. Hambatan dan kendala tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara kerja lembaga keuangan dan ke tidak sesuaian antara produk yang ditawarkan & kebutuhan masyarakat berpenghasilan kecil (Jannah & Kaluge, 2020). Indonesia juga turut membangun strategi nasionalnya dalam rangka menyongsong tingkat *economic growth* melalui pemerataan penghasilan, pemberantasan kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan dengan menggunakan inklusi keuangan. Untuk mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perlu adanya pendalaman di bidang finansial, baik dari sisi perbankan maupun non perbankan, sehingga semua dapat memiliki akses akan layanan keuangan dengan kualitas tinggi dan biayanya yang terjangkau. Dalam meningkatkan performa pada sektor keuangan, Indonesia melakukan beberapa strategi dalam mewujudkannya, antara lain, 1) perluasan inovasi produk keuangan. 2) alternatif pembayaran, dan 3) pengembangan infrastruktur jasa keuangan

Perpres RI Nomor 114/2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif telah menjadi landasan hukum serta pedoman dalam melaksanakan program keuangan inklusif di Indonesia. SNKI ini merupakan cara untuk mencapai tujuan keuangan inklusif, memacu perkembangan ekonomi, mempercepat pemberantasan tingkat kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Dengan adanya SNKI, maka hak individu masyarakat Indonesia dalam mengakses produk dan jasa keuangan yang berkualitas dan terjangkau akan

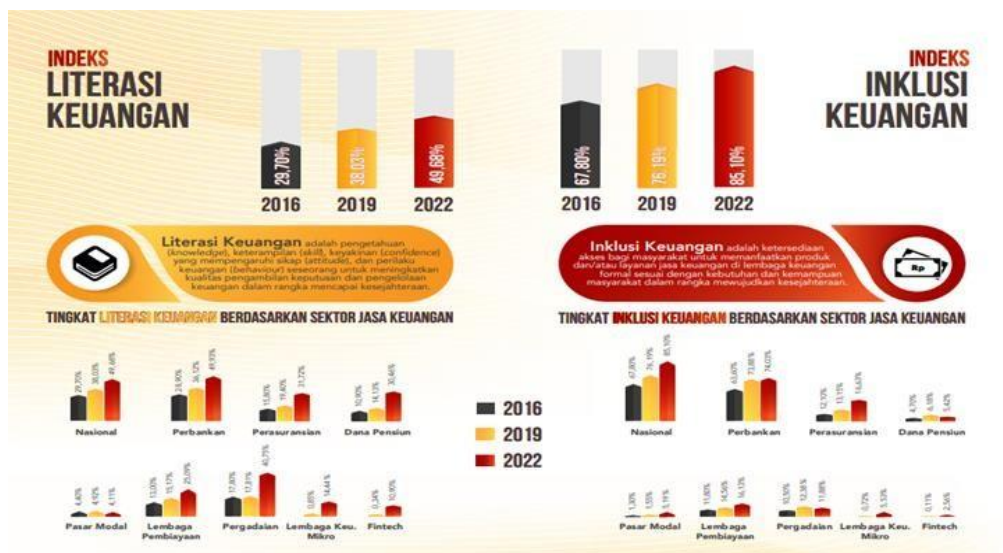
terjamin. Dengan upaya tersebut, maka SNKI akan mulai menargetkan kebijakannya pada masyarakat dengan kelas ekonomi ke bawah.

Menurut (Bank, 2023), jumlah penduduk Indonesia yang masih *unbanked* relatif besar, yaitu 97,7 juta orang (48% dari penduduk), merupakan potensi yang besar melalui pendekatan teknologi digital. Bank Indonesia memiliki tiga pilar strategi kebijakan sistem pembayaran berorientasi pertumbuhan, inklusi, dan stabilitas sebagai pembuka sekaligus perekat ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Begitupun menurut Santoso & Meera (2017) yang menyatakan bahwasanya masih banyak masyarakat Indonesia yang tergolong unbankable dan mengalami kesulitan pada saat ingin mengakses dan mendapatkan layanan keuangan formal dan kurangnya literasi keuangan di antara segmen yang lebih miskin juga merupakan hambatan yang signifikan terhadap akses dan penggunaan yang tepat dari layanan keuangan. Namun, harapan dengan keadaan yang sesungguhnya masih sedikit bertolak belakang. Belum semua masyarakat Indonesia masuk ke dalam golongan “*Banked*” dan “*Well Literate*”, dimana penduduk Indonesia belum memiliki pemahaman yang kuat tentang cara terbaik menggunakan uang untuk hal produktif.

Kecerdasan keuangan yang baik ditandai dengan adanya pemahaman literasi keuangan yang tinggi. Bahwasanya literasi keuangan bisa diartikan sebagai suatu rangkaian proses untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), serta keyakinan (*confidence*) agar mampu mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik (Sufyati Hs & Alvi Lestari, 2022). Kegiatan pengelolaan keuangan yang tertata secara sistematis ini termasuk ke dalam proses manajemen keuangan pribadi, kemampuan untuk membuat suatu pertimbangan dan melakukan investasi dimasa depan adalah bagian dari pengalaman keuangan. Untuk mencapai ketentraman dan kenyamanan dalam hidup maka perlu perencanaan dan pengelolaan investasi yang benar dan baik (Saraswati & Nugroho, 2021).

Indonesia memiliki suatu lembaga independen yang bertugas melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap keseluruhan

kegiatan didalam sektor jasa keuangan, sektor perbankan, non perbankan, dan pasar modal yakni otoritas jasa keuangan (OJK). Nurjannah Mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan(Nurjanah et al., 2022). Dengan demikian, konsep literasi keuangan bersifat multidimensi, tidak hanya mencerminkan pengetahuan tetapi juga keterampilan, sikap, dan prilaku yang sebenarnya. Berikut hasil tingkat literasi dan Inklusi keuangan masyarakat dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:



Gambar 1. 1 Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Indonesia (dalam persen)

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Hasil SNLIK (2022) menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen. Sementara indeks inklusi keuangan tahun 2022 mencapai 85,10 persen meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19 persen. Hal tersebut menunjukkan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16 persen di tahun 2019 menjadi 35,42 persen pada 24 November 2022. Persentase tersebut mengindikasikan bahwa hanya 49 dari 100 masyarakat Indonesia yang termasuk ke dalam kelompok *well literate*.

Masyarakat dinilai belum memahami dengan baik berbagi produk dan layanan jasa keuangan, lalu masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan akan menjadi kesempatan para investasi ilegal untuk mendapat keuangan.

Dengan menggunakan TIK dan sistem pembayaran yang didukung oleh smartphone. Perkembangan TIK mendatangkan berbagai peluang untuk menyediakan layanan keuangan khusus bagi semua kalangan, khususnya masyarakat yang masih tergolong miskin dan mempunyai keterbatasan dalam mengakses produk dan layanan keuangan. Pemanfaatan teknologi dalam keuangan diharapkan dapat menciptakan sistem perekonomian yang efektif dan efisien. Ditambah lagi saat ini, smartphone sudah merupakan hal yang biasa dan dimiliki oleh hampir semua kalangan. Sehingga dengan memanfaatkan teknologi yang ada diharapkan akan mempercepat dalam mengurangi angka “unbanked” di Indonesia.

Media pembayaran *Cashless* di Indonesia dimulai ketika diumumkan kepada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015, sejalan dengan itu pada tahun 2014 terdapat program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang diumumkan oleh Bank Indonesia. Semua lapisan masyarakat Indonesia mulai dari pemerintah, pelaku bisnis hingga masyarakat diharapkan dapat melakukan transaksi secara non tunai yang lebih mudah serta praktis. (Lina Marlina, 2020). Menurut Bank for International Settlements menyatakan bahwa Media pembayaran *Cashless* adalah sebuah media pembayaran yang menjelaskan tentang pelaksanaan transaksi yang sudah tidak menggunakan uang tunai. Seluruh transaksi yang digunakan tanpa menggunakan uang kartal seperti giro maupun cek, melainkan menggunakan sarana elektronik sebagai gantinya seperti transaksi melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu debit, kartu kredit maupun menggunakan teknologi baru seperti Internet Banking, E-Wallet maupun E-Payment lainnya.

Hal ini menjadikan Indonesia semakin berkembang dalam bidang perekonomian salah satunya dengan perkembangan media pembayaran. Perkembangan media pembayaran yang semakin pesat juga dibarengi dengan

perkembangan platform penyedia jasa belanja online yang semakin beragam. Dengan kemudahan pembayaran insentivitas masyarakat untuk berbelanja di situs-situs belanja online semakin tinggi. Tidak hanya dengan sistem transfer bank saja yang memudahkan masyarakat dalam penyelesaian pembayaran, namun terdapat opsi-opsi lain untuk penyelesaian pembayaran konsumen di platform belanja online.

Menciptakan Layanan Keuangan Digital dengan *cashless payment usage* yang ramah bagi semua kalangan sangat berpotensi untuk memecahkan banyak tantangan dalam menghadapi masyarakat golongan “unbanked”. Diaktifkan oleh teknologi dan berdasarkan data yang kuat, digital payment dapat membantu meningkatkan akses, meningkatkan kenyamanan, memangkas biaya, dan memberikan Layanan Keuangan yang lebih inklusif untuk semua orang (Wahyuni et al., 2023). *Cashless payment usage* sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat Indonesia, beragam variasi bentuk sistem pembayaran non tunai yang dapat dijumpai dan digunakan dalam kegiatan pembayaran. Sejak ditetapkan *cashless payment usage* di Indonesia, baik tugas negara maupun tugas masyarakat dapat terbantu dalam segala transaksi.

Cashless Payment Usage ini diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan meningkatkan konsumsi perekonomian. Transaksi *cashless payment usage* tidak melibatkan perpindahan uang secara fisik sehingga keberadaan cashless penting untuk transparansi, akuntabilitas, pengurangan, penipuan dan kejahatan terkait uang tunai, kejahatan yang dimaksud bisa berbentuk peredaran uang palsu. Layanan pembayaran non tunai di Indonesia dapat memberikan kemudahan dan keamanan bertransaksi hanya melalui media yaitu aplikasi *e-wallet*. Aplikasi “dompet” ini memiliki potensi yang sangat gemilang, diperkirakan akan semakin cerah dengan adanya bonus demografi Indonesia tahun 2030 dengan pengguna 74,6% pengguna berusia 20 hingga 35 tahun (Mahani, 2019).

Indonesia menjadi pengguna E-Wallet tertinggi di ASEAN di ecommerce pada tahun 2020. Akan tetapi pengguna E-Wallet di Indonesia tidak termasuk pengguna yang memiliki E-Wallet favorit, melainkan dalam satu pengguna

cenderung memiliki beberapa E-Wallet sekaligus dalam bertransaksi. OVO, DANA, dan GoPay dan Shopepay merupakan empat layanan yang menguasai di pasar Indonesia, dimana pembayaran non-tunai digital menjadi standar untuk memfasilitasi peningkatan aktivitas dalam layanan digital seperti ecommerce, ride-hailing dan pengiriman makanan dengan bermitra dengan ritel offline.

E-wallet adalah perangkat elektronik, layanan atau bahkan perangkat lunak (aplikasi) yang memungkinkan penggunanya melakukan transaksi online dengan pengguna lain untuk membeli barang dan jasa. Dengan e-wallet menghubungkan rekening bank ke akun dompet digital. Tentunya karena berisikan uang elektronik, maka setiap rekening juga dilengkapi dengan informasi lengkap pribadi pemilik rekening. Selain itu, keberadaan aplikasi dompet digital memiliki fungsi yang sangat serbaguna, tidak hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengontrol aktivitas jual beli. Misalnya, untuk memverifikasi usia pembeli jika ingin membeli produk seperti alkohol. Selain itu, istilah ini juga erat kaitannya dengan cashless society atau masyarakat tanpa uang tunai. Transaksi elektronik menggunakan aplikasi E-wallet dianggap nyaman, aman dan cepat, serta menawarkan beberapa keuntungan. E-wallet kini digunakan tidak hanya untuk membayar di titik offline, tetapi juga untuk pembayaran online.

Data Indonesia.id menyatakan Riau, provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi. Riau memiliki 2 Kota yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, Kota Dumai merupakan Kota Industri dan pusat bisnis diyakini banyak pengguna *cashless payment usage* termasuk Generasi Z . Generasi Z adalah peralihan dari generasi millennial dengan teknologi yang makin berkembang. Istilah generasi z semakin sering digunakan dalam presentasi yang dipaparkan oleh agen pemasaran dari Sparks dan Honey yang dalam presentase tersebut tahun lahir yang digunakan untuk mendefinisikan Gen Z ialah dari tahun 1995 sampai 2010. Generasi Z disebut pula dengan *iGeneration*, generasi internet atau generasi net. Akan tetapi Generasi Z dianggap mampu mengaplikasikan seluruh kegiatan pada satu waktu (Sparks & Honey: 2014). Selain itu Generasi Z dinilai mempunyai hubungan dekat dengan dunia maya dan segala aktivitas dilakukan di

dunia maya. Sejak kecil Generasi Z pun sudah mengenal teknologi bahkan akrab dengan gawai yang canggih, hal tersebutlah yang secara tidak langsung memengaruhi kepribadian Generasi Z. di kota Dumai selain itu, tingkat penggunaan internet di Dumai juga termasuk tinggi yang mana *Smartphone* menjadi sarana utama dalam mengakses internet, namun masih banyak keterbatasan yang ditemukan. Misalnya, masyarakat hanya menggunakan metode dan alat pembayaran non tunai tanpa mengetahui besar dampak dan kontribusi yang dapat mereka berikan kepada bangsa.

Perlu digaris bawahi disini bahwasanya penyebaran cepat teknologi pembayaran mobile dan layanan keuangan alternatif yang dikombinasikan dengan kurangnya literasi keuangan dapat memperburuk ketidaksetaraan kekayaan. Hal terpenting untuk mengedukasi masyarakat dalam hal keuangan adalah dengan memberikan literasi keuangan sehingga mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah keuangan. Dengan demikian, mereka dapat menerapkan pengetahuannya untuk mengevaluasi dan menganalisis produk & jasa keuangan, sehingga nantinya bisa memberikan keputusan keuangan yang tepat.

Generasi Z di Dumai di ukur dari usia 18-24 tahun menjadi salah satu pengguna *cashless payment* menggunakan *e-Wallet* untuk alat bertransaksi jual beli yang seharusnya bisa menjadi tolak ukur bagi kota lain. Penulis percaya masih ada celah untuk meneliti terkait hal-hal yang membuat adanya keterbatasan Dumai dalam meningkatkan indeks inklusi keuangan dan indeks literasi keuangan dalam *cashless payment* dengan menggunakan *E-Wallet*.

Dari latar belakang tersebut, peneliti memiliki keinginan untuk mencari dan menggali informasi lebih mengenai **Pengaruh Literasi Keuangan dan Pembayaran Non-Tunai terhadap Inklusi Keuangan Generasi Z di Dumai.**

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Inklusi Keuangan pada Generasi Z di Kota Dumai?
- 2) Apakah Pembayaran Non-Tunai berpengaruh terhadap Inklusi Keuangan pada Generasi Z di Kota Dumai?
- 3) Apakah Literasi Keuangan dan Pembayaran Non-Tunai berpengaruh terhadap Inklusi?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi maka perlu dilakukan batasan masalah atas terhadap masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya dibatasi pada Generasi Z di Kota Dumai yang Berkuliah di Politeknik Negeri Bengkalis.

1.4 Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan pada Generasi Z di Dumai
- 2) Menganalisis pengaruh Pembayaran Non-Tunai terhadap Inklusi Keuangan pada Generasi Z di Dumai.
- 3) Menganalisis pengaruh Literasi Keuangan dan Pembayaran Non-Tunai terhadap Inklusi Keuangan di Kota Dumai.

1.5 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Akademis

Dalam akademis, peneliti berharap penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan masyarakat luas terkait inklusi keuangan, literasi keuangan, dan manfaat dari adanya digital payment bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, juga diharapkan bisa menjadi rujukan atau referensi untuk penelitian mendatang.

2) Manfaat Praktis

Dalam hal praktis, diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah, stakeholder, dan lembaga penting lainnya dalam membuat kebijakan- kebijakan terkait peningkatan inklusi keuangan & literasi keuangan di Dumai dengan mempertimbangkan peningkatan penggunaan *cashless payment*.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai skripsi yang akan ditulis oleh penulis, maka penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai penelitian terdahulu dan landasan teori.

BAB 3 : METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian, dan definisi konsep dan definisi operasional.

BAB 4 : DESKRIPTIF HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Pada bab ini menjelaskan deskripsi data yang diperoleh dan analisis data penelitian yang dilakukan.

BAB 5 : PENUTUP

Sebagai bab terakhir dalam penelitian ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN